

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALIKOTA TERNATE AKHIR MASA JABATAN  
TAHUN 2010 – 2015**

**DAN**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014**

**TANGGAL 08 JUNI 2015**

---

---

*Bismillahirrahmannirrahim  
Assalamualaikum Wr, Wb.*

- ☞ Yang Terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
- ☞ Yang Terhormat Rekan-rekan Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Ternate.
- ☞ Yang Terhormat Wakil Walikota Ternate.
- ☞ Yang Terhormat Para Pimpinan Perguruan Tinggi.
- ☞ Yang Terhormat Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Para Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Ternate.
- ☞ Yang Terhormat Saudara Camat dan Lurah se Kota Ternate, rekan-rekan pers dan media massa.
- ☞ Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufiq dan hidayah-Nya, petunjuk dan bimbingan-Nya yang tak putus-putusnya diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di rumah rakyat yang terhormat ini, bertepatan dengan Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2015 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate, dalam rangka penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2010-2015 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014.

*Saudara Ketua, Wakil Ketua  
Sidang Dewan yang Terhormat,*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada paragraf ketiga tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya dalam pasal 69 ditegaskan Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dimaksud, maka secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dimana ditegaskan dalam pasal 15 ayat (1) dan (2), bahwa ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. LKPJ terdiri atas LKPJ Akhir Tahun dan LKPJ Akhir Masa Jabatan. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya jabatan Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pula sesuai dengan ketentuan pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan pertanggungjawaban tersebut sesuai pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disampaikan setelah diperiksa oleh BPK.

Untuk itu dalam rangka efisiensi, efektivitas dan kepraktisan waktu, maka sesuai kesepakatan bersama dewan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Tahun 2010-2015 bersamaan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014, karena secara substansial materi LPP APBD Tahun 2014 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari LKPJ Akhir Masa Jabatan, namun dokumen dari kedua laporan ini dibuat secara terpisah. Dengan kata lain khusus terkait dengan sistematika LPP APBD walaupun secara umum telah diakomodir dalam LKPJ Akhir Masa Jabatan, namun secara spesifik menyangkut realiasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta realisasi program/kegiatan Tahun 2014 secara rinci telah diakomodir dalam dokumen tersendiri dan dibagikan pada seluruh dewan dalam paripurna ini.

Kemudian berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 khususnya terkait dengan mekanisme dan prosedur LKPJ Akhir Masa Jabatan dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD, berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD, Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan, merupakan informasi dari pemerintah kepada DPRD terkait dengan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat selama 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk LPP APBD Tahun 2014 maka prosedur dan mekanisme berlaku sebagaimana tata tertib penyampaian LPP APBD setiap tahunnya. Diharapkan melalui tertib dan mekanisme penyampaian kedua laporan dimaksud, dapat lebih meningkatkan efisiensi, transparansi dan

akuntabilitas dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu Saya mengajak kepada kita semua untuk dapat melihat secara objektif sejumlah indikator keberhasilan, baik indikator program maupun indikator makro pembangunan di semua aspek yang Saya sampaikan dalam laporan pertanggungjawaban ini yang meliputi **Aspek Gambaran Umum Daerah, Keuangan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Aspek Bencana dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.**

*Saudara Ketua, Wakil Ketua  
Sidang Dewan yang Terhormat,*

Pertama-tama kami awali dengan **Aspek Gambaran Umum Daerah**, gambaran perkembangan penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun terakhir di Kota Ternate diperhadapkan dengan sejumlah tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, di satu sisi mobilitas pembangunan yang semakin meningkat dan investasi yang kondusif telah membawa dampak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan di sisi lain lonjakan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, dan derasnya urbanisasi dari berbagai wilayah ke Ternate, serta posisi Ternate yang strategis sebagai pintu gerbang Maluku Utara, berimplikasi pada tuntutan pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, seperti kebutuhan perumahan dan pemukiman yang layak, kebutuhan ketenagakerjaan, kebutuhan ruang publik, serta tuntutan pemerataan akses pelayanan kepada masyarakat, mengharuskan adanya sikap responsif dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam menjawab tantangan dan permasalahan diatas. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam mewujudkan *good governance* dengan prinsip efisiensi, efektivitas, partisipasi dan akuntabilitas.

Kita ketahui paradigma baru reformasi birokrasi telah merevitalisasi tugas dan fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, yang meliputi tugas dan fungsi *service* (pelayanan), tugas dan fungsi *regulation* (pengaturan), tugas dan fungsi *protection* (perlindungan), tugas dan fungsi *empowering* (pemberdayaan), serta tugas dan fungsi *development* (pembangunan).

Dalam konteks itulah Pemerintah Kota Ternate periode 2011-2015, dengan mengacu pada Visi dan Misi BAHARI BERKESAN, telah mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai wujud implementasi RPJM Kota Ternate dari Program Prioritas ke-6 yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi yang Efisien, Kreatif, Inovatif dan Responsif. Program Prioritas ke-8 yaitu Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah, dan Program Prioritas ke-11 yaitu Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif.

Ketiga kebijakan prioritas dalam RPJM Kota Ternate 2011-2015, sangat sejalan dengan esensi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan *good governance*, dimana langkah-langkah tata kelola pemerintahan dalam 5 (lima) Tahun terakhir, diarahkan untuk memenuhi asas *good governance* antara lain :

1. Melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, dengan membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sehingga terwujud pelayanan yang murah, cepat dan sederhana. Langkah efisiensi juga dilakukan dengan melakukan pengurangan terhadap pos-pos belanja pegawai, belanja operasional, belanja honor dan perjalanan dinas dalam komponen belanja tidak langsung. Langkah efisiensi pula dalam konteks pelayanan publik juga dilakukan melalui memperpendek mata rantai birokrasi, antara lain

melalui pendistribusian kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan, terutama dalam pelayanan perizinan.

2. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dan percepatan pembangunan di kelurahan dan kecamatan, dalam 5 (lima) Tahun ini digulirkan program Dana Partisipatif Kecamatan dan Dana Pembangunan Kelurahan, yang terus ditingkatkan setiap tahun. Juga melalui kebijakan perencanaan berbasis partisipatif, melalui *road show* Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan, serta kebijakan *one village one program* (kebijakan minimal 1 kegiatan setiap kelurahan)
3. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Kota Ternate menjadi *pilot project* Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) oleh BAPPENAS dan Kementerian Dalam Negeri, dan dikeluarkannya Peraturan Walikota Ternate No 13 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Ternate 2013. Selanjutnya dalam rangka mengefektifkan gerakan anti korupsi, maka dilibatkan stakeholder dengan membentuk Forum Anti Korupsi Kota Ternate. Selain itu agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terukur, maka pada Tahun 2014 telah disusun *road map* reformasi birokrasi serta penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, komitmen ini telah menghasilkan tertib pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, hal ini dapat dilihat dari opini BPK terhadap LHP Kota Ternate Tahun 2011, 2012 dan 2013 yang mendapatkan opini WDP dan Insya Allah untuk LHP BPK Tahun 2014 kita akan memperoleh opini yang lebih baik lagi, yang rencananya akan diserahkan pada tanggal 12 Juni nanti. Hal ini penting karena opini LHP BPK menjadi salah satu indikator dalam menentukan kualitas tata kelola pemerintahan.

Selanjutnya terkait dengan gambaran penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud dari implementasi 11 program prioritas selama 5 (lima) tahun RPJM Kota Ternate 2011-2015, yang secara langsung maupun tidak langsung telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi makro Kota Ternate, dengan gambaran capaian kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Ternate melalui APBD setiap tahunnya.

Dimana kinerja makro ekonomi Kota Ternate selama kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa kebijakan Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan telah mampu membuat beberapa Indikator Makro Ekonomi tetap terjaga pada level yang optimal.

Secara umum kinerja ekonomi Kota Ternate menunjukkan tingkat pencapaian yang baik ini tercermin dari adanya upaya perbaikan iklim investasi baik swasta maupun pemerintah, terjaganya pertumbuhan ekonomi pada posisi trend peningkatan pertahun, menurunnya jumlah penduduk miskin serta terjadi peningkatan pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate selama lima tahun terakhir mampu terus tumbuh diatas 7,50% dengan perkembangan yang lebih meningkat setiap tahunnya, ini memperlihatkan adanya sinergitas antara Program dan kebijakan Pembangunan Pemda Kota Ternate dengan pihak swasta yang ikut berperan bagi pertumbuhan ini.

Kemampuan pertumbuhan ekonomi seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak terlepas dari adanya investasi baik swasta maupun pemerintah. Investasi swasta walaupun dalam waktu lima tahun terakhir terjadi fluktuatif namun dalam waktu dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup berarti yaitu dari Rp. 590.668.900.743,- di tahun 2013 menjadi Rp. 637.053.608.963,- di tahun 2014 sedangkan investasi

pemerintah terus mengalami kenaikan antar tahun dalam lima tahun terakhir.

Sektor-sektor ekonomi yang selama ini telah memberikan andil besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa. Ketiga sektor ini memberikan kontribusi lebih dari 73,58 % bagi nilai PDRB Kota Ternate selama lima tahun terakhir.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan cukup tinggi selama 5 (lima) tahun, pada tahun 2010 PDRB sebesar Rp. 991,7 Milyar meningkat menjadi Rp. 1.707,3 Milyar pada tahun 2014. Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah Kota Ternate.

Nilai pertumbuhan ekonomi dan PDRB di atas, sebagian besar disumbang oleh sektor-sektor ekonomi yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi total nilai PDRB Kota Ternate, khususnya di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Jasa dengan tidak mengesampingkan peran sektor lain seperti Pertanian, Industri Pengolahan yang telah berperan dengan optimal yang bersinergi dengan implementasi sejumlah program/kegiatan pendukung SKPD, sehingga mampu menciptakan nilai tambah pada barang dan jasa di sektor-sektor tersebut.

Pendapatan perkapita masyarakat dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 sebesar Rp. 4.795.058,- meningkat menjadi Rp. 5.402.087,- pada tahun 2011 dan terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 7.623.797,-.

Indikator makro ekonomi lain yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah inflasi, makna dari inflasi



adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum di konsumsi rumahtangga. Perkembangan harga dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat serta berhubungan dengan produktifitas ekonomi.

Inflasi di Kota Ternate lima tahun terakhir mengalami fluktuaktif dimana pada tahun 2010, 2011 dan 2012 inflasi bisa ditekan sampai pada angka 3%. Pada Tahun 2013 dan 2014 terjadi kenaikan pada inflasi Kota Ternate yakni melebihi 9% ini banyak disebabkan oleh pengaruh faktor eksternal seperti kenaikan harga BBM, serta peralihan musim yang menyebabkan naiknya tinggi gelombang di perairan Maluku Utara yang mempengaruhi laju distribusi serta kapasitas produksi sektor perikanan dan juga faktor komoditas yang berasal dari kelompok komoditas bergejolak (*Volatile foods*) yang merupakan bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu, memang seringkali menjadi lokomotif terakselerasinya inflasi di Kota Ternate baik secara Tahunan, triwulan maupun bulanan, dan pada tahun 2015 untuk bulan April 2015 laju inflasi Kota Ternate kembali stabil yaitu sebesar 7,83%.

Salah satu indikator sosial untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam hal kesejahteraan penduduk adalah indikator ketenagakerjaan, permasalahan penting dalam bidang ketenagakerjaan selain keadaan tenaga kerja dan struktur ketenagakerjaan, adalah permasalahan pengangguran. Dari sisi ekonomi pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan permasalahan dibidang ekonomi, namun juga menimbulkan berbagai masalah dibidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Ternate selama lima tahun terakhir juga berfluktuatif dimana pada tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan yakni pada tahun 2010 sebesar 10,31%, Tahun 2011 sebesar 8,66%, Tahun 2012 7,26% dan Tahun 2013 mencapai 4,85%, ini mengindikasikan adanya peningkatan usaha baik disektor formal maupun informal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Pada Tahun 2014 Sesuai hasil SAKERNAS yang dilakukan oleh BPS Kota Ternate tercatat meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 8,72 %. Peningkatan angka pengangguran yang cukup signifikan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yang pertama perubahan pada jumlah angkatan kerja mendorong peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2014 sebesar 78,92 %. Naiknya TPAK tersebut ditengarai disebabkan meningkatnya penduduk usia 15 tahun ke atas, terutama lulusan SLTA yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi sebesar 13,25 % tidak terserap ke pasar tenaga kerja. Faktor yang kedua, peningkatan angka pengangguran tersebut karena berlakunya Undang-undang No 4 Tahun 2009 pada tanggal 12 Januari 2014 tentang mineral dan batu bara berupa larangan ekspor mineral mentah sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran oleh perusahaan tambang di Maluku Utara. Sebagai pusat perekonomian di Maluku Utara maka Ternate menjadi tujuan utama para mantan karyawan tersebut untuk mencari pekerjaan baru. Walaupun demikian secara umum orang yang bekerja pada tahun 2014 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013, dimana orang yang bekerja pada tahun 2013 sebesar 77.271 orang sedangkan pada tahun 2014 sebesar 85.232 orang. Di samping itu jika kita melihat daya serap tenaga kerja pada beberapa sektor strategis, pada tahun 2014 cukup meningkat pada tahun 2013 antara lain sektor industri tahun 2014 sebesar 12.519 orang dibandingkan tahun 2013 yang hanya 6.705 orang, begitu pula sektor jasa pada tahun 2014 meningkat 66.924

orang dibandingkan tahun 2013 sebesar 62.886 orang. Adanya peningkatan orang bekerja dan daya serap kerja pada beberapa sektor strategis, mengindikasikan pembangunan beberapa infrastruktur jasa dan perdagangan serta kebijakan investasi dua tahun terakhir, memberikan efek yang positif bagi penyerapan tenaga kerja.

Sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan di bidang sosial yang berhubungan dengan bidang ekonomi diperlukan suatu indikator yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia pada suatu wilayah yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dihitung dengan tiga indeks yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pendapatan. Nilai IPM Kota Ternate selama lima tahun Terakhir terus meningkat diatas 78 % dan merupakan yang tertinggi dari Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara. Dari hasil penghitungan IPM ini menunjukkan bahwa program dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan selama ini khususnya di Bidang Pendidikan dan Kesehatan telah berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti yang tergambar pada angka Indeks Pembangunan Manusia tersebut. Selain itu terjadi kenaikan pada indeks pendapatan yang menunjukkan adanya kenaikan daya beli masyarakat, hal ini sejalan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan gambaran situasi makro ekonomi tahun 2010-2014 serta prediksi tahun 2015, kebijakan makro ekonomi sebagaimana yang telah tertuang dalam Kebijakan Umum APBD tahun 2015, lebih diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang mendasar, terutama pengangguran dan kemiskinan dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi dan keamanan wilayah, prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 di dorong terutama dengan meningkatkan investasi serta beberapa program prioritas pelayanan dasar lainnya.

*Saudara Ketua, Wakil Ketua,  
Sidang Dewan Yang Terhormat.*

Selanjutnya pada **Aspek Keuangan**, dalam selama 5 (lima) tahun Pemerintah Kota Ternate terus melakukan penguatan struktur APBD dengan upaya peningkatkan pendapatan daerah, baik melalui regulasi peraturan daerah maupun dengan memanfaatkan peningkatan sektor jasa dan iklim investasi yang semakin kondusif, dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap perekonomian daerah. Gambaran target dan realisasi pendapatan dan belanja sebagai berikut :

### **Realisasi Pendapatan**

Adapun realisasi pendapatan daerah Kota Ternate pada tahun 2010 sebesar Rp. 458.813.473.921,- atau 98,56 % meningkat pada tahun 2014 sebesar Rp. 772.962.110.479,- atau 102,41 %, dan untuk tahun 2015 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. 812.923.996.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate pada tahun 2010 sebesar Rp. 21.442.993.424,- atau 79,79 % meningkat pada tahun 2014 sebesar Rp. 57.765.211.341,- atau 106 %, dan untuk tahun 2015 pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp. 61.190.852.000,-.

#### 2. Dana Perimbangan

Adapun realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2010 sebesar Rp. 417.075.237.962,- atau 99,83 % meningkat pada tahun 2014 sebesar Rp. 715.145.849.038,- atau 102,17 %, dan untuk tahun 2015 Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 639.964.287.000,-.

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah

Adapun realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah pada tahun 2010 sebesar Rp. 20.296.242.535,- atau 97,55 % dan realisasi pada tahun 2014 sebesar Rp. 51.050.100,- atau 19,63 %.

### **Realisasi Belanja**

Adapun realisasi anggaran belanja dalam APBD Kota Ternate pada tahun 2010 sebesar Rp. 454.843.014.632,- atau 93,17 % meningkat pada tahun 2014 sebesar Rp. 730.910.518.287,- atau 93,12 %, dan untuk tahun 2015 belanja daerah ditargetkan sebesar Rp. 869.809.114.080,-, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Belanja Tidak Langsung

Adapun realisasi belanja Tidak langsung dalam APBD pada tahun 2010 sebesar Rp. 243.968.158.815,- atau 92,02 % meningkat pada tahun 2014 sebesar Rp. 392.232.921.336,- atau 93,11 %.

#### 2. Belanja Langsung

Adapun realisasi belanja Langsung dalam APBD pada tahun 2010 sebesar Rp. 210.874.855.817,- atau 94,54 % meningkat pada tahun 2014 sebesar Rp. 338.677.596.951,- atau 93,14.

*Saudara Ketua, Wakil Ketua,  
Sidang Dewan Yang Terhormat.*

Selanjutnya **Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**, pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib yang terdiri 22 Bidang Pelayanan melaksanakan selama tahun 2010 - 2015, terdiri dari 716 program dan 9.049 kegiatan, dengan alokasi anggaran untuk urusan wajib selama tahun 2010-2015, sesuai urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi pelayanan SKPD sebesar Rp. 1.716.771.832.219,-.

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pilihan yang terdiri 6 Bidang Pelayanan melaksanakan selama tahun 2010 - 2015, terdiri dari 310 program dan 1.282 kegiatan, dengan alokasi anggaran untuk urusan pilihan selama tahun 2010-2015, sesuai urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi pelayanan SKPD sebesar Rp. 142.050.202.911,-.

Implementasi kebijakan sesuai urusan pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun mengacu pada Visi-Misi dan 11 Program Prioritas RPJM Kota Ternate, maka penjabaran lebih lanjut pada setiap komponen tersebut tercermin melalui program dan kegiatan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing urusan bidang pelayanan dalam APBD Kota Ternate dan realisasi sesuai 11 Program Prioritas, sebagai berikut :

**1. Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan**

Kebijakan komponen ini sebagai implementasi urusan wajib tercermin melalui bidang yang diarahkan pada peningkatan dan penataan infrastruktur perkotaan serta percepatan dan pemerataan infrastruktur secara merata dan berkeadilan di tiap kecamatan, terutama pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan perkotaan untuk membuka keterisolasian, serta memungkinkan terjadinya mobilitas arus barang dan manusia yang mempercepat perkembangan secara merata pada semua wilayah kecamatan.

Alokasi anggaran untuk komponen ini selama 5 tahun sebesar Rp. 480.125.086.540,-.

Keberhasilan dari program prioritas ini sebagai perwujudan dari Visi dan Misi Ternate Berkeadilan dapat dilihat dari indikator target pencapaian sasaran program/kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan infrastruktur Jalan Kota dalam wilayah Kota Ternate pada Tahun 2010 sepanjang 19,22 Km, meningkat pada awal

Tahun 2015 menjadi 46,70 Km. Sedangkan Jalan Propinsi pada Tahun 2010 sepanjang 269,651 Km, meningkat pada awal Tahun 2015 menjadi 296,944 Km.

2. Untuk Jumlah Jembatan di kota Ternate Tahun 2010 sebanyak 144 unit meningkat menjadi 179 unit pada Tahun 2015.
3. Pemenuhan infrastruktur kebutuhan air bersih selama 5 Tahun yang tersebar di wilayah Kota Ternate, dapat dirincikan dengan jumlah sambungan jaringan air bersih di perumahan masyarakat Tahun 2010 sebanyak 17.282 rumah, awal Tahun 2015 meningkat menjadi 23.855 rumah, sedangkan cakupan pelayanan pada Tahun 2010 masih berkisar 58,89 persen, pada awal Tahun 2015 meningkat menjadi 74,70 persen, sementara jumlah kelurahan dalam wilayah Kota Ternate yang terlayani jaringan air bersih Tahun 2010 sebanyak 44 kelurahan, dan meningkat pada awal Tahun 2015 menjadi 59 kelurahan, khusus untuk 3 (tiga) kelurahan yaitu Dorpedu, Afetaduma dan Rua menggunakan sumber air yang di kelola oleh LPM, kualitas dan kapasitas jaringan air bersih ini akan terus ditingkatkan setiap saat, termasuk kebutuhan air bersih di daerah ketinggian, terdapat beberapa kelurahan di wilayah ketinggian yang pada tahun 2010 belum menikmati jaringan air bersih, pada tahun 2012 telah menikmati air bersih pada Kel. Moya, Torano, Marikurubu dan Tongole, pada tahun 2014 Kel. Kulaba, Bula dan Sulamadaha, pada tahun 2015 Kel. Takome, Tobololo dan Tamadehe, untuk Kel. Foradiahi akan diresmikan hari Selasa besok, dan untuk Kel. Tadenas, Tafaga, Tafamutu dan Figur Moti akan diresmikan pada hari Kamis nanti. Atas komitmen dan keberhasilan pemenuhan kebutuhan air bersih Pemerintah Kota Ternate telah menerima penghargaan Perpamsi Award yang diberikan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena respon Pemerintah Daerah terhadap PDAM dinilai sangat baik.

4. Pemenuhan Infrastruktur listrik berupa pemasangan jaringan listrik di wilayah kecamatan termasuk penerangan jalan umum, sebanyak 1.169 unit di Tahun 2010, pada Tahun 2015 menjadi 1.671 unit, dan pada tanggal 10 Juni nanti Insya Allah kita akan meresmikan pelayanan listrik di Kecamatan Moti dan Hiri, dimana untuk pemasangan jaringan dan biaya penyambungan instalasi ke masing-masing rumah dilakukan secara gratis, di Pulau Hiri sebanyak kurang lebih 475 rumah dan Pulau Moti sebanyak kurang lebih 759 rumah, Insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan meresmikan pemasangan jaringan listrik di Kecamatan Batang Dua.

## **2. Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas**

Kebijakan komponen ini sebagai implementasi urusan wajib diarahkan pada upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, khususnya peningkatan derajat Pendidikan melalui perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau, sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup, dan mutu yang terus membaik. Dengan alokasi anggaran selama 5 tahun untuk bidang pendidikan sebesar Rp. 251.159.050.831,-

Keberhasilan dari program prioritas ini sebagai perwujudan dari Visi dan Misi Ternate Berkeadilan dapat dilihat dari indikator target pencapaian sasaran program/kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Ruang Kelas Baru pada sekolah, meliputi :
  - 1) Sekolah Dasar, pada Tahun 2010 terdapat 630 ruang kelas, bertambah pada tahun 2015 menjadi 761 ruang kelas.
  - 2) SMP, pada Tahun 2010 terdapat 269 ruang kelas, bertambah pada tahun 2015 menjadi 365 ruang kelas.



- 3) SMA, pada Tahun 2010 terdapat 174 ruang kelas, bertambah pada tahun 2015 menjadi 248 ruang kelas.
  - 4) SMK, pada Tahun 2010 terdapat 85 ruang kelas, bertambah pada tahun 2015 menjadi 118 ruang kelas.
2. Pembangunan Gedung Sekolah di wilayah Kota Ternate, meliputi:
- 1) Pembangunan Gedung Sekolah Dasar, pada Tahun 2010 terdapat 105 sekolah, bertambah pada tahun 2015 menjadi 106 sekolah.
  - 2) Pembangunan Gedung SMA, pada Tahun 2010 terdapat 10 sekolah, bertambah pada tahun 2015 menjadi 11 sekolah.
  - 3) Pembangunan Gedung SMK, pada Tahun 2010 terdapat 8 sekolah, bertambah pada tahun 2015 menjadi 9 sekolah.
- Kegiatan rehabilitasi terhadap sekolah yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan dan berat di seluruh tingkatan sekolah, selama 5 (lima) tahun terus dilakukan, dengan total anggaran rehabilitasi sebesar Rp. 24.089.166.225,-.
3. Selain indikator pembangunan fisik yang menjadi parameter keberhasilan pendidikan, juga indikator non fisik berupa angka melek huruf yang meningkat dari Tahun 2010 sebanyak 95 persen menjadi 99,97 persen pada Tahun 2015, Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tahun 2010 untuk SD sebesar 86,37 persen meningkat menjadi 89,07 persen pada Tahun 2015, SMP sebesar 66,58 persen pada Tahun 2010 meningkat menjadi 72,3 persen pada Tahun 2015 dan SMA/SMK sebesar 55,42 persen meningkat pada Tahun 2015 menjadi 70,02 persen. Angka kelulusan ujian nasional SMP dan SMA/SMK pada Tahun 2010 untuk SMP sebesar 99,55 persen dan SMA juga sebesar 99,55 persen meningkat pada Tahun 2015 dengan angka kelulusan ujian untuk SMP sebesar 100 persen dan untuk SMA/SMK sebesar 99,95 persen.

4. Dalam implementasi prioritas ini kebijakan Pemerintah Kota Ternate juga menyentuh pendidikan karakter dan moral melalui program BTA (Baca Tulis Al-Quran) dimana jumlah wisudawannya sejak Tahun 2012 sebanyak 2.907 siswa, Tahun 2013 sebanyak 2.903 siswa, Tahun 2014 sebanyak 3.022 siswa dan pada Tahun 2015 mencapai 3.249 siswa, dengan total selama 4 (empat) tahun berjumlah 12.081 siswa.
5. Selain BTA program pendidikan berkarakter juga diimplementasi melalui beasiswa bagi Hafiz Qur'an untuk mengikuti pendidikan di Pondok Pasantren Al-Fatah Tamboro Magetan Jawa Timur hingga Tahun 2015 menjadi 55 orang. Selain itu beasiswa juga diberikan kepada guru mengaji untuk mengikuti pendidikan guru Agama Islam di Pondok Pasantren Al-khairat Palu Sulawesi Tengah.

Komitmen alokasi anggaran di sektor pendidikan setiap tahun dalam APBD melampaui 20 persen dari APBD sesuai amanat Undang-undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Salah satu indikator keberhasilan program prioritas bidang pendidikan, dapat dilihat dari penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam dari Kementerian Agama Tahun 2014.

### **3. Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkuaitas**

Kebijakan komponen ini sebagai implementasi urusan wajib diarahkan pada upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia, melalui peningkatan derajat kesehatan dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau, dukungan sarana dan fasilitas memadai, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan keperawatan yang cukup, dan mutu pelayanan yang terus membaik.

Anggaran yang dialokasikan untuk komponen ini selama 5 tahun untuk bidang Kesehatan sebesar Rp. 70.929.006.528,-.

Keberhasilan dari program prioritas ini sebagai perwujudan dari Visi dan Misi Ternate Berkeadilan dapat dilihat dari indikator target pencapaian sasaran program/kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah Pasien yang mendapat Pelayanan gratis di Puskesmas, pada Tahun 2010 sebanyak 8.572 pasien, meningkat pada Tahun 2014 sebanyak 149.680 pasien, dan sampai dengan bulan Maret Tahun 2015 jumlah pasien yang mendapat pelayanan gratis sebanyak 40.271 orang.
2. Angka Harapan Hidup pada Tahun 2010 sebesar 67 Tahun meningkat pada Tahun 2015 sebesar 71 Tahun.
3. Untuk kasus positif Malaria pada Tahun 2010 terdapat 1.176 kasus menurun pada akhir Tahun 2014 menjadi 212 kasus.
4. Peningkatan sarana prasarana Kesehatan, dimana pada Tahun 2010 Kota Ternate baru memiliki 8 Puskesmas, 14 Puskesmas Pembantu, 12 unit Puskesmas Keliling, 167 Posyandu, 16 Polindes dan 11 Poskeskel, hal ini meningkat pada Tahun 2015, dimana Kota Ternate telah memiliki 10 puskesmas, 14 puskesmas pembantu yang tersebar di wilayah pelosok, 13 unit puskesmas keliling, 170 Posyandu, 16 Polindes, 30 Poskeskel, serta di luar layanan kesehatan yang disediakan oleh pihak swasta.

#### **4. Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proposional dan Pro Rakyat**

Kebijakan komponen ini sebagai implementasi urusan wajib ini diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, melalui desain program berbasis keswadayaan dan berciri budaya.

Alokasi anggaran untuk komponen ini selama 5 tahun sebesar Rp. 49.341.821.053,-.

Keberhasilan dari program prioritas ini sebagai perwujudan dari Visi dan Misi Ternate Berkeadilan dapat dilihat dari indikator target pencapaian sasaran program/kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Dana Pembangunan Kelurahan pada Tahun 2011 sebesar Rp. 1.750.000.000,- pada Tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 10.000.000.000,- dan untuk 5 (lima) tahun total Dana Pembangunan Kelurahan sebesar Rp. 24.480.000.000,-.
2. Peningkatan Dana Partisipatif Kecamatan pada Tahun 2010 sebesar Rp. 1.015.000.000,- pada Tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 2.495.323.750,- dan untuk 5 (lima) Tahun total Dana Partisipatif Kecamatan sebesar Rp. 9.538.023.530,-.

Komitmen alokasi DPK dalam APBD merupakan bagian dari keberpihakan pemerintah kepada masyarakat melalui percepatan pembangunan di kelurahan, selain dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong, juga dapat menjawab sejumlah permasalahan dan kebutuhan masyarakat di kelurahan dan kecamatan, terutama yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

**5. Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang serasi antara kebutuhan dan daya dukung lahan, antar aspek topografi dan kawasan pantai/pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keresasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis**

Kebijakan Program ini diwujudkan melalui implementasi yang diarahkan pada penataan infrastruktur perkotaan sebagai Kota Jasa dan Perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktifitas perkotaan yang tertib menuju terwujudnya Kota Ternate yang harmoni, sehat, aman dan nyaman dan berciri budaya serta berwasasan lingkungan, dengan alokasi anggaran untuk program ini selama 5 tahun sebesar Rp. 203.754.337.871,-.

Keberhasilan dari program prioritas ini sebagai perwujudan dari Visi dan Misi Ternate Berwawasan Lingkungan dapat dilihat dari indikator target pencapaian sasaran program/kegiatan sebagai berikut :

1. Tersedianya sejumlah dokumen perencanaan selama 5 (lima) Tahun dalam mendukung pemanfaatan dan pengendalian ruang, antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032 melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 sebagai dasar pengendalian ruang dalam wilayah Kota Ternate yang didukung oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), dan ditindaklanjuti dengan berbagai dokumen teknis, meliputi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Masterplan Tata Ruang Terbuka Hijau. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dokumen Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) dan dokumen Masterplan Kawasan Pesisir.
2. Penataan taman kota dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagai areal publik yang asri nyaman dan tertib, pada Tahun 2010 terdapat 14 taman, pada Tahun 2015 meningkat menjadi 19 taman, dengan 3 taman yang menjadi icon baru di Kota Ternate, yaitu Taman Fort Orange, Taman Nukila dan Taman Pantai Falajawa.
3. Kebijakan Penghijauan Kota Ternate, pada Tahun 2010 sebanyak 165 pohon, pada Tahun 2015 meningkat menjadi 4.370 pohon.

Penerimaan penghargaan Adipura selama 9 (sembilan) kali berturut-turut sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam mewujudkan pemanfaatan dan pengendalian ruang dan penghargaan Program Penanaman 1 Milyar Pohon dari Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2012.

**6. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif**

Kebijakan Program ini diwujudkan melalui implementasi yang diarahkan peningkatan pada terwujudnya *good government*, dengan sumberdaya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat, dengan alokasi anggaran untuk program ini selama 5 tahun sebesar Rp. 518.570.981.564,-.

Keberhasilan dari program prioritas ini sebagai perwujudan dari Visi dan Misi Ternate Kota Budaya dapat dilihat dari indikator target pencapaian sasaran program/kegiatan, antara lain :

1. Penataan organisasi perangkat daerah melalui penyusunan uraian tugas dan standar pelayanan minimal
2. Penguatan asas akuntabilitas melalui penerbitan Peraturan Daerah pada Tahun 2010 sebanyak 12 Perda, meningkat menjadi 92 Perda pada Tahun 2015.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui keikutsertaan aparatur dalam berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan, berupa Diklatpim IV, Diklatpim III dan Diklatpim II yang pada Tahun 2010 berjumlah 83 peserta, meningkat pada Tahun 2015 menjadi 234 peserta.

Indikator keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan, dapat dibuktikan dengan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Juara 2 Lomba Kelurahan Tingkat Nasional pada Tahun 2011 dan Juara 3 Lomba Kelurahan Tingkat Nasional pada Tahun 2012 dan penghargaan Manggala Karya Kencana dari Presiden Republik Indonesia kepada Walikota Ternate pada Tahun 2012, serta penghargaan Kategori Terbaik Pengisian WBRS DAK Tahun 2012 - 2013 dari Kementerian Keuangan pada Tahun 2014.

## **7. Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja**

Kebijakan Program ini diwujudkan melalui implementasi yang diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Petani, Nelayan, Pekebun, Peternak, Buruh dan Pekerja, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pedagang Kaki Lima, Pedagang Tradisional, dan pemenuhan sarana jasa dan perdagangan serta industri lokal menuju pada kemandirian dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) program, dengan alokasi anggaran untuk program ini selama 5 tahun sebesar Rp. 65.173.295.081,-.

Keberhasilan dari program prioritas ini sebagai perwujudan dari Visi dan Misi Ternate Mandiri dapat dilihat dari indikator target pencapaian sasaran program/kegiatan sebagai berikut :

- 1) Jumlah UMKM yang mendapat pembinaan dari Pemkot pada Tahun 2010 sejumlah 7.117 UKM, meningkat pada awal Tahun 2015 menjadi 11.095 UKM.
- 2) Jumlah Bantuan yang diberikan kepada UKM, pada Tahun 2010 sebesar Rp. 235.924.500,- meningkat pada Tahun 2015 hingga mencapai Rp. 3.002.371.436,-.
- 3) Jumlah tenaga kerja yang terserap, pada Tahun 2010 sebanyak 13.001 orang meningkat pada Tahun 2015 mencapai 18.330 orang.

## **8. Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah**

Kebijakan Program ini diwujudkan melalui implementasi yang diarahkan pada terwujudnya pelayanan publik oleh aparatur yang profesional, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas, dengan alokasi anggaran untuk program ini selama 5 tahun sebesar Rp. 26.373.149.514,-.

Keberhasilan dari program prioritas ini sebagai perwujudan dari Visi dan Misi Ternate Berkeadilan dapat dilihat dari indikator target pencapaian sasaran program/kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah e-KTP yang terlayani hingga Tahun 2015 sebanyak 85.612 keping.
2. Jumlah perizinan yang terlayani, pada Tahun 2010 sebanyak 556, meningkat pada Tahun 2015 sebanyak 635.
3. Pelayanan KTP/KK/Akta Kelahiran dan Akta Kematian secara gratis.
4. Jumlah Koleksi buku di perpustakaan, pada Tahun 2010 sebanyak 507 judul buku menjadi 2.227 judul buku pada Tahun 2015.

Salah satu indikator keberhasilan dalam manajemen pengelolaan kependudukan, dapat dilihat dari penghargaan Pelaksanaan Pelayanan e-KTP Massal Kategori Terbaik III Wilayah Indonesia Timur dari Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2012.

## **9. Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan**

Kebijakan Program ini diarahkan pada peningkatan kemandirian masyarakat, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi, pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi yang mengarah pada produktivitas dan kemampuan daya saing, dengan alokasi anggaran untuk program ini selama 5 tahun sebesar Rp. 85.907.752.219,-.

Keberhasilan dari program prioritas ini sebagai perwujudan dari Visi dan Misi Ternate Mandiri dan Berwawasan Lingkungan dapat dilihat dari indikator target pencapaian sasaran program/kegiatan sebagai berikut :



1. Data Peningkatan Jumlah Komoditi Produksi Perikanan, pada Tahun 2010 sebesar 15.439,59 ton meningkat produksinya hingga pada Tahun 2015 mencapai 67.242, 62 ton.
2. Peningkatan infrastruktur jasa dan perdagangan dalam 5 (lima) tahun, antara lain :
  - 1) Pembangunan Pasar Higienis
  - 2) Pembangunan Pasar Percontohan
  - 3) Pembangunan Ruko
  - 4) Pembangunan Pasar Dufa-dufa
  - 5) Pembangunan Pasar Syariah Sasa
  - 6) Revitalisasi Pasar Bastiong
  - 7) Pembangunan Gedung BPRS Bahari Berkesan
  - 8) Pembangunan Dekranasda
  - 9) Pembangunan Pabrik Rumput Laut

Indikator keberhasilan kebijakan prioritas sektor perdagangan, dapat dibuktikan dengan penghargaan Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan pada Tahun 2012.

#### **10. Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan, dan Adat Istiadat**

Kebijakan Program ini diwujudkan melalui implementasi yang diarahkan untuk menjawab permasalahan perkotaan seperti menurunnya kesadaran spiritualitas keberagaman, solidaritas sosial dan kesadaran kebudayaan sebagai identitas daerah dan jati diri masyarakat, meningkatkan etos sosial, dan optimalisasi penanggulangan masalah-masalah sosial seperti minuman keras, PSK, narkoba serta permasalahan sosial lainnya, dengan alokasi anggaran untuk program ini 5 tahun sebesar Rp. 58.731.851.071,-.

Keberhasilan dari program prioritas ini sebagai perwujudan dari Visi dan Misi Ternate Budaya, Agama dan Harmonis dapat dilihat dari

indikator target pencapaian sasaran program/kegiatan sebagai berikut:

1. Revitalisasi Benteng yang saat ini telah menjadi pusat ruang publik, dan akan dikembangkan menjadi pusat kuliner dan pusat informasi pariwisata terpadu.
2. Jumlah TPQ pada Tahun 2010 sebanyak 145 unit meningkat pada Tahun 2015 menjadi 182 unit.
3. Jumlah kunjungan wisata meningkat dari Tahun 2010 sebanyak 77.428 wisatawan domestik dan 641 wisatawan mancanegara, pada Tahun 2014 sebanyak 199.907 wisatawan domestik dan 1.029 wisatawan mancanegara.

Salah satu indikator keberhasilan atas kebijakan program prioritas bidang sosial, dapat dilihat dari penghargaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dari Wakil Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2012.

Indikator keberhasilan dalam mewujudkan komitmen Kota Budaya, dapat dibuktikan dengan adanya penghargaan Ternate Sebagai Kota Pusaka Dunia dari Sindo Weekly pada Tahun 2015, serta penghargaan Rekor MURI Tarian Soya-soya Terpanjang pada Tahun 2015.

#### **11. Penegakan Supermasi Hukum, Hak Azasi Manusia, Untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif**

Kebijakan Program ini diwujudkan melalui implementasi yang diarahkan untuk menjawab masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah, termasuk upaya mengadakan regulasi daerah yang mampu mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, serta regulasi untuk menjamin kualitas pelayanan publik, dengan alokasi anggaran untuk program ini yaitu melalui pelaksanaan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selama 5 tahun sebesar Rp. 48.755.702.858,-.

Keberhasilan dari program prioritas ini sebagai perwujudan dari Visi dan Misi Ternate Berkeadilan dan Harmonis dapat dilihat dari indikator target pencapaian sasaran program/kegiatan sebagai berikut:

1. Indeks kriminalitas sesuai hasil evaluasi akhir pelaksanaan RPJM Kota Ternate 2011-2015 yang dilakukan Kementerian Bappenas menunjukkan bahwa indeks kriminalitas kota Ternate sudah terpenuhi atau mencapai target, yaitu kondisi Kamtibmas yang relative kondusif.
2. Tingkat Partisipasi Publik dalam pilkada baik Pilwako maupun Pilgub diatas 75 persen.

*Saudara Ketua, Wakil Ketua,  
Sidang Dewan Yang Terhormat.*

Selanjutnya **Aspek Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**, untuk instansi pemberi tugas pembantuan kepada Pemerintah Kota Ternate selama Tahun 2010-2015 yang berasal dari Pemerintah, melalui 9 (sembilan) Kementerian dengan 8 (delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan.

#### **Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya**

1. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate  
Selama tahun 2010-2015 dengan sumber dana untuk 7 (tujuh) kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berasal dari APBN, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.667.219.000,-.
2. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ternate  
Pada Tahun 2011 dengan sumber dana untuk 1 (satu) kegiatan di Dinas Pertanian dan Kehutanan berasal dari APBN, dengan total anggaran sebesar Rp. 620.000.000,-.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate  
Selama tahun 2010-2015 dengan sumber dana untuk 10 (sepuluh) kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan berasal dari APBN, dengan total anggaran sebesar Rp. 26.554.997.000,-.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate  
Selama tahun 2010-2015 dengan sumber dana untuk 3 (tiga) kegiatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan berasal dari APBN, dengan total anggaran sebesar Rp. 15.385.087.000,-.
5. Dinas Kesehatan Kota Ternate  
Selama tahun 2010-2015 dengan sumber dana untuk 5 (lima) kegiatan di Dinas Kesehatan dari APBN, dengan total anggaran sebesar Rp. 24.930.115.000,-.
6. Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate  
Selama tahun 2010-2015 dengan sumber dana untuk 2 (dua) kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dari APBN, dengan total anggaran sebesar Rp. 13.537.500.000,-.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Pada Tahun 2011 dengan sumber dana untuk 1 (satu) kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah berasal dari APBN, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate  
Selama tahun 2010-2015 dengan sumber dana untuk 2 (dua) kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari APBN, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

*Saudara Ketua, Wakil Ketua,  
Sidang Dewan Yang Terhormat.*

Selanjutnya pada bagian akhir penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota ini, akan dilaporkan **Aspek Bencana dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.**

Diawal Tahun 2011, Kota Ternate telah diguyur hujan yang begitu lebat, yang disertai angin kencang sehingga menyebabkan sebagian besar wilayah Kota Ternate terkena angin puting beliung, serta terjadinya longsor yang tersebar diwilayah Kota Ternate, Hal ini dilakukan investigasi dan penanganan, sehingga sebagian besar penanganan akibat terjadinya bencana dapat ditangani dengan baik. Di akhir Tahun 2011 kita dikejutkan dengan erupsinya gunung api Gamalama, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir lahar dingin, dan akibatnya sebagian warga masyarakat melakukan pengungsian ditempat-tempat pengungsian yang tersebar di 9 (sembilan) titik pengungsian, dengan jumlah pengungsi 2.711 jiwa / 627 KK. Disamping itu juga penanganan normalisasi aliran sungai/kalimati, yang dimaksudkan untuk menormalkan kembali sungai/barangka yang tertimbun akibat erupsi gunung api Gamalama.

Upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dan daerahnya dari ancaman bencana telah dibangun infrastruktur berupa talud khususnya pada kawasan pemukiman warga serta pembarian dana stimulan, namun hal ini dirasakan masih belum mampu mencegah tingginya kejadian bencana yang datang tidak terduga. Disamping upaya Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggalnya perlu ditingkatkan kesadaran Masyarakat tentang lingkungan dan langkah pencegahan dalam mengurangi resiko bencana.

Menyikapi dampak erupsi gunung Gamalama di akhir Tahun 2011 yang terjadi susul menyusul sampai pada Tahun 2012, membawa konsekuensi turunnya lahar dingin pada beberapa kawasan rawan bencana, antara lain Kelurahan Maliaro, Kelurahan Tubo dan Kelurahan Togafo, dengan mengalirnya pengungsi pada 9 titik dengan jumlah 2.711 jiwa / 627 KK, sedangkan kerugian berupa kerusakan rumah dengan rusak total : 30 unit, rusak sedang : 86 unit dan kemasukan lumpur : 700 unit, dan untuk kerusakan jembatan sejumlah 6 jembatan serta rusaknya sejumlah talud akibat gerusan air (erosi) pada beberapa kawasan rawan bencana seperti sungai Tugurara dan Maliaro. Oleh karena itu langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan bencana yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kota Ternate, antara lain normalisasi sungai dan revitalisasi barangka, perbaikan talud, jalan dan jembatan serta sosialisasi dan relokasi perumahan warga pada kawasan yang sama.

Cuaca ekstrim di wilayah Kota Ternate disertai dengan curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2013, pukul 19.00 WIT berakibat Banjir Rob atau meluapnya air permukaan, sehingga berdampak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi masyarakat Kota Ternate. Meskipun hal tersebut tidak menimbulkan korban jiwa tetapi mengakibatkan kerugian harta benda bagi masyarakat sekitarnya dan juga rusaknya sarana dan prasarana umum yang telah terbangun, terputusnya akses jalan akibat gerusan air, infrastruktur jembatan perkotaan, sarana dan prasarana sumber daya air, sarana pemukiman bahkan perkebunan rakyat, di sebagian besar wilayah Kota Ternate yang tersebar di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Hiri dan Kecamatan Moti. Rusaknya tanggul-tanggul penahan tanah, daerah aliran sungai, pendangkalan akibat sedimentasi, erosi, pengikisan air terhadap dinding sungai bahkan terbawanya kembali sia-sia material vulkanik hasil erupsi Gunung Gamalama oleh arus luapan banjir. Wilayah yang paling parah dilanda

bencana banjir yaitu di Kecamatan Moti khususnya di Kelurahan Tafamutu dan Takofi. Banjir di wilayah tersebut berupa banjir bandang disertai dengan bebatuan bebatuan akibat erosi.

Kejadian bencana yang diakibatkan meletusnya Gunung Api Gamalama pada tanggal 18 Desember 2014 pukul 22.41 WIT hingga dinaikan statusnya menjadi siaga (Level II), menyebabkan hujan abu di wilayah Pulau Ternate dan tersebar pada 4 (empat) wilayah kecamatan, namun dampak bencana tersebut tidak menimbulkan kerusakan infrastruktur, pemukiman dan sarana umum. Meskipun hal tersebut tidak menimbulkan kerusakan, namun aktivitas masyarakat cukup terganggu dan terbatasnya akses publik Bandara Babullah yang harus ditutup selama 11 hari.

Pada tanggal 06 Desember 2014 pukul 23.45 WIT terjadi bencana kebakaran pada Pasar Seribu Kios Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah dan terjadi selama kurang lebih 3 (tiga) jam akibat arus pendek listrik. Kejadian bencana Kebakaran Pasar Seribu Kios ini mengakibatkan 178 unit kios hangus terbakar dan dirasakan cukup berdampak karena berperan melumpuhkan perekonomian masyarakat Ternate. Meskipun bencana tersebut tidak menimbulkan korban jiwa namun menimbulkan kerugian berupa barang dagangan dan barang-barang milik pedagang yang menempati lokasi tersebut, dengan perkiraan kerugian mencapai 1,5 Milyar Rupiah.

Bencana Gempa Tektonik juga terjadi pada tanggal 15 November 2014 pukul 09.31 WIT dengan kekuatan 7,3 Skala Richter. Kejadian gempa tidak menimbulkan korban, baik korban jiwa maupun harta benda dan tidak ada kerusakan dan kerugian yang terjadi bagi masyarakat Kota Ternate khususnya serta tidak menimbulkan kepanikan dan keresahan masyarakat.

Oleh karena itu langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan bencana yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kota Ternate, antara lain pemberlakuan tanggap darurat bencana sejak 18 Desember 2014 sampai 02 Januari 2015, peringatan dini bencana erupsi Gunung Api dan Tsunami serta tetap melakukan normalisasi sungai, revitalisasi barangka dan perbaikan talud sebagai antisipasi bencana banjir lahar dingin, serta sosialisasi kepada masyarakat terhadap resiko dan bahaya kebakaran.

### **Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Secara umum selama kurun waktu lima Tahun 2011 sampai dengan 2015 situasi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kota Ternate relatif kondusif, meskipun masih mudahnya masyarakat terprovokasi oleh isu-isu yang digulirkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab sehingga sering menimbulkan ketegangan bagi masyarakat, dimana beberapa masalah terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dapat diatasi, namun demikian stabilitas dan kondisi keamanan daerah perlu tetap mendapat perhatian, untuk menjamin kenyamanan masyarakat luas dalam melaksanakan aktifitas sosial dan ekonomi.

*Saudara Ketua, Wakil Ketua  
Sidang Dewan yang Terhormat,*

Secara substansi sesuai pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 LKPJ akhir Masa Jabatan merupakan ringkasan dari laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sisa masa jabatan yang belum dilaporkan yaitu hingga triwulan I tahun 2015. Laporan ini disajikan menurut ruang lingkup yang berpedoman pada aturan tersebut dengan pencapaian pelaksanaan RPJMD sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, mengingat pencapaian sasaran RPJMD akan dihitung pada akhir tahun 2015.



Capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang dijelskan dalam Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan ini, sesungguhnya merupakan kinerja bersama antar eksekutif, legislatif dan semua elemen masyarakat dalam mencapai Visi Kota Ternate menuju masyarakat Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan.

Walaupun kita sadari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ, adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran maupun 5 (lima) tahunan dan LKPJ di maksud, sesuai pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 hanya dibahas oleh DPRD secara internal dan *output*-nya berupa keputusan DPRD dalam bentuk rekomendasi yang berupa catatan strategis dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan, namun kita semua menghargai bahwa hal ini selain merupakan bagian dari prosedur dan mekanisme normatif yang harus kita penuhi, juga merupakan bagian dari komitmen bersama untuk melakukan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Bila kita mengacu pada hasil evaluasi RPJM Kota Ternate 2011-2015, yang dilakukan oleh Tim Evaluasi dan Pelaporan BAPPENAS, menunjukkan secara keseluruhan Pemerintah Kota Ternate telah berhasil mencapai perwujudan Visi dan Misi RPJM Kota Ternate. Berdasarkan indeks dan target pencapaian indikator yang telah ditetapkan, walaupun secara spesifik masih diperlukan peningkatan dan optimalisasi kinerja pada beberapa prioritas program tertentu. Karena kita sadari masih banyak terdapat kekurangan dan permasalahan yang menuntut tanggung jawab kita bersama, mengingat dinamika perkembangan Kota Ternate saat ini dan kedepan semakin kompleks, memberikan tantangan bagi kita bersama, antara lain lonjakan penduduk yang terus meningkat, pertumbuhan angkatan kerja, kepadatan lalu

lintas, kebutuhan infrastruktur perkotaan dibidang jasa dan perdagangan, kelistrikan, air bersih, keterbatasan lahan perkotaan, pemerataan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, lanjutan revitalisasi situs sejarah dan kawasan rawan bencana serta optimalisasi sektor perikanan dan kepariwisataan, mengharuskan kita mencari solusi untuk menjawab tantangan dan permasalahan dimaksud, melalui kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks itulah kita realistis untuk menuntaskan 11 Program Prioritas RPJM dalam waktu 5 (lima) tahun tidak cukup, dibutuhkan waktu dan anggaran yang memadai untuk mewujudkan Visi dan Misi bersama menuju Ternate Mandiri, Ternate Cerdas, Ternate Sehat, Ternate Terang, Ternate Sejahtera serta Ternate yang Indah, Aman dan Nyaman.

Untuk itulah dengan segala kerendahan hati bila diizinkan Allah SWT dan dikehendaki rakyat, Saya telah bertekad untuk melanjutkan pembangunan Kota Ternate 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian pokok-pokok substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, untuk selanjutnya akan menjadi referensi kajian Dewan yang terhormat.

Mengakhiri laporan ini, Saya bersama Saudara Saya Ir. Arifin Djafar, M.Si selaku Walikota dan Wakil Walikota Ternate, dipenghujung pengabdian kami berdua perlu menyampaikan apresiasi secara khusus kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, karena LKPJ Akhir Masa Jabatan dan LPP APBD yang Saya sampaikan pada hari ini merupakan LKPJ dan LPP APBD terakhir dalam masa jabatan Saya, dimana dalam masa bhakti Dewan periode lalu maupun Dewan saat ini mampu memberikan kontribusi yang sangat berharga, khususnya dalam menciptakan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, melalui

tertib penyampaian laporan pertanggungjawaban yang selalu kita laksanakan tepat waktu, sesuai *schedule* yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, maupun berbagai saran dan catatan strategis yang disampaikan dalam konteks laporan ini, dalam rangka mengefektifkan kebijakan kedepan. Dengan kerendahan hati pula pada kesempatan ini kami berdua menyampaikan permohonan maaf kepada dewan dan semua pihak, terutama pada seluruh warga Kota Ternate, sebagai manusia yang manusiawi apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan selama memimpin negeri ini.

Terima kasih dan penghargaan pula kami sampaikan kepada para Muspida, Pimpinan instansi vertikal maupun pihak ketiga, yang telah menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kota Ternate selama ini, demikian pula atas peran pers dan media massa maupun unsur *stakeholder* lainnya dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Ternate.

Akhirnya sebelum menutup laporan ini, perkenankanlah Saya menyampaikan Dolo Bololo sebagai bentuk kearifan lokal Kota Ternate.

**Ngone Doka Dai Loko  
Ahu Yo Ma Fara-Fara  
Si Rubu-Rubu Yo Ma Moi-Moi  
Doka Saya Rako Moi**

*Yang Artinya*

**Kita Bagaikan Kembang di Padang Rumput  
Tumbuh dan Hidup Terpencar-Pencar  
Terhimpun Dalam Satu Genggaman  
Bagaikan Hiasan Seikat Kembang**

*Maknanya*

Kita Tinggal di Kota Ternate  
Terdiri Dari Berbagai Suku, Ras dan Agama  
Mari Kita Satukan Hati, Tujur Kata dan Perbuatan  
Agar Tercipta Rasa Persaudaraan Sejati

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhai dan memberikan kekuatan kepada kita bersama dalam melaksanakan amanat rakyat dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan di daerah ini.

Ternate, 8 Juni 2015

**WALIKOTA TERNATE**

**H. BURHAN ABDURAHMAN**

**PIDATO**



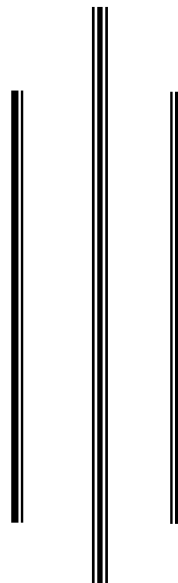
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALIKOTA TERNATE AKHIR MASA JABATAN**

**DAN**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014**

**DIHADAPAN SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TERNATE**

*TANGGAL, 08 JUNI 2015*



**PEMERINTAH KOTA TERNATE**

**TAHUN 2015**